



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 782/VIII/2013

I/AGUSTUS 2013



Komisi VII Ingatkan Jangan Terjadi Kelangkaan BBM dan Pasokan Listrik



KEGIATAN DPR-RI MINGGU PERTAMA AGUSTUS 2013

Pada minggu-minggu awal Agustus 2013 ini, DPR-RI akan segera mengakhiri Masa Reses Persidangan IV 2012-2013, dan segera memasuki Masa Persidangan I 2013-2014 yang dimulai pada 16 Agustus 2013. Pada Rapat Paripurna 16 Agustus ini terdapat dua agenda yaitu: Pidato Ketua DPR-RI dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2013-2014, dan Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN 2014 dan Nota Keuangannya. Masa Persidangan I berjumlah 49 hari kerja atau 70 hari kalender, dimulai 16 Agustus ditutup 25 Oktober 2013. Berikut ringkasan agenda kegiatan DPR selama Masa Persidangan I 2013-2014.

Pelaksanaan Fungsi Legislasi

Sesuai tata Tertib DPR, Badan Legislasi DPR-RI pada Masa Persidangan I 2013-2014 akan melaksanakan beberapa kegiatan/tugas antara lain: [1] menyiapkan RUU usul DPR berdasar Prolegnas. Dalam Prolegnas Prioritas 2013 (70 RUU) ada 7 RUU yang menjadi tanggungjawab Baleg untuk menyiapkan draft RUU dan naskah akademiknya. Dari 7 RUU, 3 RUU yang penyusunannya telah diselesaikan, sehingga ada 4 RUU yang belum selesai. Yaitu 1 RUU masih dalam proses penyusunan oleh Panja dan tinggal diputuskan di tingkat Pleno Baleg, 1 RUU dalam tahap perumusan draft oleh Panja Baleg dan 2 RUU sedang dipersiapkan. [2] Melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU sebelum disampaikan kepada Pimpinan DPR. Dalam hal ini, ada 5 RUU, yaitu: RUU tentang Kelautan, RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji, RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU tentang Pencarian dan Pertolongan, dan RUU tentang Jasa Konstruksi. [3] Melakukan pengubahan dan/atau penyempurnaan RUU yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah.

Pembahasan RUU tentang Percepatan Pembangunan

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie



Daerah Tertinggal sudah melampaui batas waktu sebagaimana diatur dalam Tata tertib DPR, karena sudah berlangsung 6 kali Masa persidangan. Baleg telah menyampaikan/melaporkan kepada Pimpinan DPR dan diputuskan bahwa Baleg ditugaskan untuk membicarakan tidak lanjut pembahasan/penarikan RUU ini dengan menteri-menteri yang mewakili Presiden.

Komisi I DPR, mengagendakan pembahasan beberapa RUU antara lain RUU tentang Penyiaran, RUU tentang Perjanjian Internasional (inisiatif DPR), RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara (inisiatif Pemerintah), dan melakukan perumusan/penyusunan RUU inisiatif Komisi I tentang Radio Televisi Indonesia dan tentang Hukum Disiplin Militer. Sementara RUU ratifikasi, Komisi I sedang membahas RUU tentang pengesahan *Internasional Convention for Protection off All Persons from Enforced Disappearance*.

Komisi II pada Masa Persidangan I, akan melakukan penyusunan/perumusan RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru Provinsi Papua dan Papua Barat dan RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru Non-Papua



dan Papua Barat. Komisi II akan melanjutkan pembahasan RUU tentang Aparatur Sipil Negara, antara lain membahas beberapa permasalahan krusial yaitu Jabatan Eksekutif Senior, Komisi Aparatur Sipil Negara (KSAN), Organisasi ASN dan Penggajian dan Pensiunan Pegawai ASN. Pembahasan juga dilakukan terhadap RUU Pemilihan Kepala Daerah, RUU tentang pembentukan daerah otonom Baru yaitu Calon DOB Kab. Buton Tengah, Calon DOB Kab. Buton Selatan, Calon DOB Kab. Muna Raya, dan Calon DOB Kab. Raha. Selain itu, RUU tentang perubahan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan RUU tentang Perencanaan, juga akan dilanjutkan pembahasannya oleh Komisi II.

Komisi VII pada Masa Persidangan I, akan mengagendakan pembahasan mengenai Kebijakan Energi (KEN) selain memfokuskan pada pembahasan perubahan RUU Migas yang merupakan usul inisiatif DPR. Komisi VIII pada Masa Persidangan I, mengagendakan lanjutan pembahasan pembicaraan tingkat I RUU tentang Jaminan Produk Halal, penyempurnaan rumusan draft RUU tentang perubahan UU No. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan penyempurnaan draft RUU tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender.

Komisi IX Pada Masa Persidangan I masih akan melanjutkan pembahasan terhadap 5 RUU, yaitu RUU tentang Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, RUU tentang Keperawatan, RUU tenaga Kesehatan, dan RUU tentang Kesehatan Jiwa. Selain itu, RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga juga sedang dalam tahap harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi di Badan Legislasi.

Pansus RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan (PPDK) akan melakukan rapat-rapat kerja dengan Kementerian yang ditunjuk Presiden untuk membahas RUU ini. Diperkirakan menteri yang ditunjuk adalah Mendagri, Menkumham, Menlu, dan Menteri BPPN, dan DPD-RI. Apabila Raker berjalan sesuai rencana dan Pemerintah menyetujui melanjutkan pembahasan RUU Inisiatif DPR ini, diharapkan Pemerintah menyampaikan DIM segera. Pansus akan melanjutkan proses pembahasan sebagaimana mekanisme DPR-RI, dengan kegiatan Raker-Raker pembahasan DIM, Raker Panja, Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi. Juga rapat dengan DPD-RI. Diharapkan, Pembicaraan Tingkat I akan diagendakan pada Masa Sidang I dan Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II akan berlanjut pada Masa Sidang berikutnya.

Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Komisi I DPR-RI merencanakan pembahasan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Mitra-Mitra kerja Komisi I tahun anggaran 2012 dan melanjutkan pembahasan RKA-KL Mitra kerja Komisi I tahun 2014. Komisi II akan mengagendakan pembahasan dan penyempurnaan RKA K/L tahun anggaran 2014 dengan seluruh mitra kerja Komisi II.

Komisi VII pada Masa Persidangan I, akan melakukan Raker/RDP dengan Menteri ESDM dan mitra terkait lainnya menyangkut pembahasan dan penetapan Asumsi Dasar ICP, *lifting* minyak bumi, LPG bersubsidi, subsidi BBN, alpha dan volume, serta besaran subsidi BBM dalam RUU APBN 2014 dan Pembahasan dan Penetapan Asumsi Dasar Subsidi Listrik dalam RUU APBN 2014 (definitif). Selain itu dilakukan pembahasan RKA-K/L dan RKP APBN 2014 dengan Menteri ESDM, Menristek dan LPNK, dan Menteri LH. Komisi VIII juga akan melaksanakan Raker dan RDP membahas RKA-KL tahun 2014 dengan mitra kerjanya, yaitu Kemenag RI, Kemensos RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Komisi IX pada Masa Persidangan I ini, mengagendakan raker dan RDP dengan Menkes-RI, Menakertrans, BPOM, BKKBN, dan BNP2TKI membahas Laporan Pemerintah Pusat tahun Anggaran 2012.

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Badan Legislasi pada Masa Persidangan I 2013-2014 akan melaksanakan kunjungan kerja ke beberapa daerah dalam rangka penyusunan RUU yang dipersiapkan Baleg. Komisi I melakukan kegiatan antara lain, *fit and proper test* terhadap Calon Panglima TNI; RDP dengan mitra kerja, melanjutkan kegiatan panja-panja Komisi I (Panja PLIK MPLIK, Panja Tanah, Panja Rumah Dinas dan kesejahteraan TNI, Panja BRTI dan Panja Digitalisasi; kunjungan kerja dalam maupun luar negeri dan kunjungan spesifik. Komisi II mengagendakan rapat fungsi pengawasan dengan pemerintah mengenai e-KTP dan RDP dengan KPU dan Bawaslu dalam rangka persiapan Pemilu 2014. Rapat-rapat juga dilakukan Panja Komisi II yaitu Panja Penyelesaian Konflik dan Sengketa Perencanaan, Panja Tenaga Honorar Kategori I dan II, dan Panja Pengelolaan Aset Negara.

Sementara itu, kegiatan pengawasan oleh Komisi VII diarahkan untuk membahas isu-isu aktual yang perlu memperoleh penyelesaian lebih cepat, terutama yang terkait masalah pertambangan dan lingkungan hidup. Komisi VII juga akan melakukan pembahasan lanjutan terhadap beberapa Panja yang masih berjalan yaitu Panja Minerba, dan Panja Hulu Listrik. Komisi VIII juga melakukan Raker, RDP maupun RDPU serta kunjungan ke daerah pada masa reses. Komisi VIII dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji 2013/1434 akan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji dalam 2 tahap, disamping itu juga membentuk Panja perguruan Tinggi Agama Islam. Komisi IX akan melaksanakan Raker/RDP/RDPU terkait dengan masih banyaknya permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan program Pemerintah di Pusat dan daerah, antara lain di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, pengawasan obat dan makanan dan kependudukan.

Diplomasi Parlemen

Badan Kerjasama Antar Parlemen pada Masa persidangan I, akan banyak melaksanakan kegiatan di bidang diplomasi dengan parlemen luar negeri. Antara lain, penerimaan

tamu, BKSAP akan menerima kunjungan Ketua Parlemen Peru, *Parliamentary Assembly Bosnia and Herzegovina*, Grup Persahabatan Parlemen Makedonia, dan kunjungan Senat/Wakil Senat Presiden Argentina.

Untuk kegiatan pengiriman delegasi, DPR-RI akan mengirim delegasi untuk acara muhibah ke Bahrain, kunjungan GKSBR DPR RI - Parlemen Papua Nugini ke Papua Nugini, GKSBR DPR RI - Parle-

men Belgia ke Belgia, muhibah ke Siprus, kunjungan GKSBR DPR RI - Parlemen Azerbaijan ke Azerbaijan, muhibah ke Iran, Sudan, dan Rumania. Juga mengirim delegasi ke *The 129th Assembly Of The IPU And Related Meetings* di Jenewa Swiss, delegasi ke *The Sidang Umum ke-34 Asean Inter-Parliamentary Assembly (Aipa)* ke Brunei Darussalam.

BKSAP DPR-RI akan menyelenggarakan Rapat/FGD/Sidang Internasional di

Indonesia, yaitu Sidang Umum *South East Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC)* di Medan, *Focus Group Discussion* tentang Kosovo, dan kerjasama dengan sekretariat IPU menyelenggarakan *Parliamentary Conference On The World Trade Organization* di Bali. Acara di Bali ini diselenggarakan di sela-sela penyelenggaraan *The 9th Ministerial Conference On The WTO*.

Komisi VII Ingatkan Jangan Terjadi Kelangkaan BBM dan Pasokan Listrik



Tim Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR memantau Terminal Bahan Bakar Minyak Tanjung Perak, Jawa Timur.

Setelah pekan lalu Komisi V DPR memantau infrastruktur dan transportasi, pekan ini Komisi VII DPR memantau ketersediaan BBM dan pasokan listrik menjelang mudik lebaran tahun 2013. Komisi VII DPR mengirim tiga Tim Kunjungan Spesifik ke Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Komisi VII DPR RI memberikan perhatian dan dukungan serius terhadap kesiapan pasokan BBM dan Listrik wilayah Jawa Barat dan Banten menjelang dan saat lebaran. Saat meninjau Terminal BBM di Padalarang dan PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten, Rabu pekan lalu, Wakil Ketua Komisi VII DPR Ahmad Farihal menegaskan, menjelang, saat dan pasca lebaran H+7 tidak boleh ada kelangkaan pasokan baik BBM maupun pasokan listrik.

“Ya nggak boleh ada kelangkaan.

Kita sangat menekankan betul jangan sampai ada kelangkaan, agar masyarakat yang merayakan lebaran tidak terganggu,” ungkap Farihal.

Komisi VII mengirim tiga tim, selain ke Jawa Barat, juga mengirim tim kunjungan spesifik dalam rangka meninjau kesiapan ketersediaan pasokan BBM dan Listrik ke Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Sumatera Utara.

Dalam kunjungan ke Terminal BBM Padalarang Tim Komisi VII DPR

diterima General Manajer Wilayah III Hasto Wibowo, Kepala Terminal BBM Padalarang Nandang Sanuddin dan B. Putut.

Hasto menjelaskan, Pertamina khususnya TBBM Bandung sudah ada kesiapan dalam pendistribusian pasokan BBM ke setiap SPBU di Wilayah Jabar, “Kita utamakan bagaimana masyarakat saat membutuhkan BBM mereka tidak kesusahan dan tidak antre berkepanjangan,” ujarnya.

Sedangkan untuk pendistribusian pasokan BBM ke setiap SPBU Pertamina mengalami kendala dengan adanya kemacetan jalan. Untuk itu pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kapolda dan Kapolres wilayah Jabar, sehingga kepolisian tidak mengalihkan mobil tangki ke arah lain selain ke SPBU yang dituju.

Guna mengantisipasi kekurangan Bahan Bakar Minyak (BBM) saat mudik Hari Raya Lebaran nanti, Pertamina telah menyiapkan BBM jenis Pertamina dan Pertamina plus dalam kemasan yang dijual eceran.

Model penjualan Pertamina ini menjadi salah satu upaya perseroan mengantisipasi kemacetan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU). "Tahun lalu terjadi antrean panjang di setiap SPBU jalur padat kendaraan," kata Hasto.

Menurutnya, penjualan Pertamina

eceran ini tersedia di tenda-tenda resmi milik Pertamina. Pertamina eceran tersimpan secara aman di dalam kaleng dan drum yang dapat diisi ulang. BBM dalam kemasan ini telah tersedia dalam jumlah 20 ribu kaleng/drum.

"Pertamina sudah menyiapkan kemasan 5, 10, dan 20 liter untuk Pertamina yang akan dijual eceran saat arus mudik sampai arus balik," tutur Hasto menambahkan. Saat ditanya harga Pertamina kemasan ini, Hasto mengaku belum menentukannya. Namun, diperkirakan harga Pertamina eceran ini lebih mahal Rp 500.

"Selisih harga sekitar Rp 500 untuk ongkos angkut dari SPBU menuju tempat penjualan, juga untuk biaya produksi kemasan," tuturnya.

Dalam pertemuan Komisi VII dengan PT. PLN di Bale Sumur Bandung, Direktur Utama PT. PLN (Persero), Nasri Sebaying menjelaskan, untuk DJBB tidak

mengalami kendala yang berarti. Selama periode H-15 sampai dengan H+15, PLN DJBB meniadakan semua kegiatan pemeliharaan listrik terencana yang mengakibatkan pemadaman aliran, menyiapkan posko siaga sebanyak 348 posko dengan jumlah total personil siaga 2.832 petugas yang berjaga 24 jam melayani pelanggan.

Disamping itu, PT. PLN menyiapkan sarana pendukung berupa kendaraan pelayanan teknik 434 unit, trafo mobil 58 unit, mobil crane 23 unit, mobil deteksi gangguan 10 unit dan genset (1 sd 100 kVa 87 unit).

Dari hasil kunjungannya di Terminal BBM Bandung dan Bale Sumur Bandung, kata politisi Partai Persatuan Pembangunan ini menilai secara sepintas PT. Pertamina dan PT. PLN sudah siap untuk pasokan BBM menjelang sampai H+7 lebaran. *(hindra)foto:iwan armanias/parle.*

Komisi VII DPR Pantau Stok BBM Di Jatim

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Zainuddin Amali memantau secara langsung ketersediaan BBM, LPG 3 Kg dan Kesiapan Daya Listrik menjelang dan sesudah hari Raya Idul Fitri 2013 (1434 H) di Provinsi Jawa Timur. Pasalnya, Provinsi Jawa Timur dikenal sebagai salah satu provinsi yang menjadi daerah tujuan utama dan transit para migran di pulau Jawa untuk melakukan mudik.

Hal ini disampaikan kepada wartawan saat tim Komisi VII DPR RI mengunjungi Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) di Tanjung Perak, Surabaya, Jum'at (26/7).

"Para migran dari Jatim diperkirakan mencapai 14,86 juta jiwa dan pada tahun ini jumlah migran yang melakukan mudik ke Provinsi Jatim diperkirakan mencapai 8,90 juta jiwa atau meningkat 8,9 persen dibanding tahun 2012 sebesar 8,17 persen jiwa," jelasnya.

Melihat persoalan tersebut, menurut

Zainuddin Amali, PT. Pertamina (Persero) memprediksikan bahwa geliat peningkatan aktivitas masyarakat akan terjadi 15 hari sebelum dan sesudah hari Raya Idul Fitri 2013 (1434 H). Kondisi tersebut mengakibatkan kebutuhan Premium dan LPG khususnya LPG 3 Kg diperkirakan akan mengalami peningkatan sebesar 14 persen dibandingkan rata-rata distribusi normal.

Sebaliknya permintaan akan Solar diperkirakan akan mengalami penurunan sebesar 5 persen dari rata-rata distribusi normal. Sedangkan kebutuhan LPG 3 Kg diperkirakan meningkat hingga mencapai kisaran 20 persen dari kebutuhan normal.

"Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan memberikan kepastian serta kenyamanan para pemudik serta guna memastikan segala sesuatunya terkait supply BBM, LPG dan listrik tidak mengalami hambatan, maka Komisi VII DPR RI memandang perlu untuk melakukan



Wakil Ketua Komisi VII DPR Zainuddin Amali.

kunjungan lapangan ke Provinsi Jawa Timur," tandasnya lagi.

Dalam kunjungan ini Komisi VII meminta kesiapan manajemen PT. Pertamina (Persero) khususnya Pertamina Region V Jawa Timur untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dengan pihak berwajib, Kementerian ESDM RI, Pemda dan Dinas Perhubungan (DLLAJ) serta instansi terkait lainnya untuk menghindari penyalahgunaan distribusi BBM dan LPG 3 Kg.

Sementara itu, General Manager PT. Pertamina Marketing Operation Region V, Afandi menjelaskan, SPBU kantong ini adalah truk tangki Pertamina yang disiapkan di beberapa titik rawan macet di Jawa Timur (Jatim).

“Truk tangki ini bisa dengan cepat bergerak ke SPBU yang kehabisan stok BBM di masa arus mudik atau arus balik,” ujar Afandi saat menerima kunjungan spesifik Komisi VII DPR RI di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Tanjung Perak.

Ada delapan titik SPBU kantong yang disiapkan, yaitu di Probolinggo, Kediri-Jombang-Nganjuk (dua titik), Jember, Situbondo, Blitar, Bojonegoro, dan Trenggalek. Di tiap SPBU kantong akan ada satu truk tangki BBM yang standby. Truk tangki yang disiagakan ini kapasitasnya bervariasi antara 16 kilo liter sampai 32 kilo liter menyesuaikan kebutuhan.

“Kalau kondisi macet kan susah, kiriman dari TBBM bisa jadi juga terlambat, kalau ada SPBU yang kehabisan stok,

tangki di SPBU kantong ini bisa cepat menjangkau lokasi,” jelas Afandi.

Kunjungan spesifik Komisi VII DPR dipimpin oleh Zainudin Amali dari Fraksi PG, tim membawa sekitar 10 orang terdiri Daryatmo Mardiyanto (F-PDI Perjuangan), Siti Romlah (F-PD), Satya W. Yudha (F-PG), Markum Singodimejo (F-PG), Rofi Munawar (F-PKS), Totok Daryanto (F-PAN), Tommy Adrian Firmansyah (F-PPP), Nur Yasin (F-PKB), dan Saifuddin Donodjoyo (F-Gerindra). (iw)/
foto:iwan armanias/parle.

Komisi VII DPR Minta Pertamina Jaga Stok BBM



Tim Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR meninjau Terminal Bahan Bakar Minyak Tanjung Perak.

Antisipasi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada masa lebaran 2013 mulai dijalankan PT Pertamina. Perusahaan ini tidak hanya menyiapkan suplai dan stok BBM, tetapi juga petugas siaga dan alternatif solusi, berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kantong.

General Manager PT. Pertamina Marketing Operation Region V, Afandi menjelaskan, SPBU kantong ini adalah truk tangki Pertamina yang disiapkan di beberapa titik rawan macet di Jawa Timur (Jatim).

“Truk tangki ini bisa dengan cepat bergerak ke SPBU yang kehabisan stok BBM di masa arus mudik atau

arus balik,” ujar Afandi saat menerima kunjungan spesifik Komisi VII DPR RI di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Tanjung Perak, Jum’at (26/7’13).

Ada delapan titik SPBU kantong yang disiapkan, yaitu di Probolinggo, Kediri-Jombang-Nganjuk (dua titik), Jember, Situbondo, Blitar, Bojonegoro, dan Trenggalek. Di tiap SPBU kantong akan ada satu truk tangki BBM yang standby. Truk tangki yang disiagakan ini kapasitasnya bervariasi antara 16 kilo liter sampai 32 kilo liter menyesuaikan kebutuhan.

“Kalau kondisi macet kan susah, kiriman dari TBBM bisa jadi juga terlambat, kalau ada SPBU yang keha-

bisan stok, tangki di SPBU kantong ini bisa cepat menjangkau lokasi,” jelas Afandi.

Estimasi penggunaan premium di Jatim di masa lebaran (Agustus 2013) rata-rata mencapai 11.369 kilo liter atau naik sekitar 15 persen dari kondisi normal. Konsumsi BBM premium di bulan Januari-Juni 2013 rata-rata 10.910 kilo liter.

“Suplai untuk premium menjadi 11 juta liter per hari, sedang solar 6 juta liter per hari,” ujarnya.

Sedangkan estimasi kebutuhan solar Jatim rata-rata 4.645 kilo liter atau turun 10 persen dari konsumsi kondisi normal rata-rata 5.010 kilo liter. “Solar cenderung turun karena truk dan angkutan barang jelang dan pasca lebaran dilarang beroperasi, tapi kami tetap menambah stok sebagai antisipasi hingga 10 persen dari kondisi normal,” jelasnya.

Selain itu, estimasi peningkatan pertamax diperkirakan terjadi pada H-6 sampai H+6. Diperkirakan kenaikan antara 12 persen hingga 30 persen. Sedangkan pertamax plus diperkirakan naik 5 persen sampai 70 persen.

Sementara, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Zainuddin Amali, meminta Pertamina agar menjaga ketersediaan pasokan BBM. “Dalam inspeksi mendadak (Sidak) ini kami ingin tahu kesiapan Pertamina, kami tidak mau dipusingkan dengan kelangkaan BBM

pada lebaran nanti,” katanya.

Sidak di Depo Pertamina Tanjung Perak ini, menurut Zainuddin, tidak hanya dilakukan di Jatim, namun juga di Sumatera Utara dan Jawa Barat.

Selain mengecek kesiapan BBM, sidak juga sekaligus mengecek kesediaan elpiji, avtur dan listrik.

“Berdasarkan penjelasan Pertamina, ketersediaan BBM untuk lebaran ini cu-

kup, tinggal nanti pendistribusiannya. Kami minta supaya ada jaminan lancar, tidak ada gangguan. Masyarakat bisa mendapatkan BBM dengan mudah,” tegasnya. (iw)/foto:iwan armanias/parle.

Komisi VII DPR Akan Panggil Dirjen Lapas Terkait Anggaran Listrik

Terkait dengan minimnya anggaran listrik di lembaga pemasyarakatan (LP), terutama di LP Tanjung Gusta, Medan, Komisi VII DPR berencana memanggil Dirjen Lapas Kementerian Hukum dan HAM untuk menjelaskan hal tersebut. Berdasarkan informasi, salah satu penyebab kerusakan dan pembakaran LP Tanjung Gusta karena kebutuhan air dan listrik tidak bisa dipenuhi dan sering mengalami pemadaman.

Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Kunjungan spesifik Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana usai mendengar penjelasan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham di LP Tanjung Gusta, Medan, Kamis (25/7).

Menurut Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Ham Sumut, anggaran untuk listrik hanya Rp 16 juta/bulan sementara tagihan listrik mencapai Rp 60 – 65 juta per bulan. Minimnya anggaran listrik ini menyebabkan Kanwil Kemenkumham menunggak tagihan listrik hingga mencapai Rp 708 juta. Mendengar hal tersebut, anggota Tim Komisi VII menyatakan kaget.

“Perencanaannya bagaimana ini? kami akan panggil Dirjen Pemasyarakatan,” tandas Sutan yang juga politisi PD asal Sumut ini.

Kepada Tim Komisi VII, Kepala Kanwil Kemenkumham Sumut menjelaskan, pengusulan anggaran listrik berdasarkan rata-rata tagihan setiap bulannya. Namun, entah mengapa jadi turun jumlahnya, demikian pula untuk anggaran bahan makanan.



Tim Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR mengunjungi Kantor Wilayah Kemenkumham di LP Tanjung Gusta, Medan.

Dijelaskan Sutan, bahwa permasalahan kelistrikan di LP Tanjung Gusta memang bagian kecil dari krisis listrik di Sumut yang kekurangan tenaga 150 MW. Namun, persoalan di tahanan dan penjara bisa diselesaikan jika antar departemen yang membidangi pemasyarakatan dan listrik dapat berkoordinasi. Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Tanjung Gusta harus memiliki sistem tenaga listrik cadangan.

“Harus ada cadangan. Jangan disamakan dengan fasilitas lainnya. Nanti akan ada task force yang akan mendata kebutuhan listrik di Sumut, termasuk di LP Tanjung Gusta ini,” katanya. (sc)

Komisi VII Menyayangkan Kurang Terserapnya Anggaran Kelistrikan

Anggota Tim Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR RI ke Sumatera Utara, Jhonny Allen Marbun (F-PD) menyayangkan kurang terserapnya anggaran kelistrikan dari APBN oleh PLN. Sementara kondisi di lapangan, beberapa pembangkit tidak optimal karena kurangnya pemeliharaan.

Hal tersebut disampaikan Jhonny Allen saat pertemuan Tim Komisi VII

dengan GM Pertamina, GM PLN dan BPH Migas membahas kesiapan ketersediaan BBM dan Listrik menjelang Lebaran di Medan, beberapa waktu lalu.

Dijelaskan Jhonny Allen, bahwa satu-satunya BUMN yang mendapatkan APBN setiap tahunnya adalah PLN untuk perbaikan peningkatan kelistrikan di Indonesia. Untuk tahun 2013 saja

hampir Rp 12 Trilyun, padahal dilihat dari sisi hukum sebetulnya ini melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara.

“Namun karena untuk kepentingan kelistrikan kita diamankan. Anggaran ini langsung dikelola PLN yang ditugaskan oleh Dirjen Kelistrikan. Bahkan sampai kita kasih margin 7% untuk memper-



Anggota Komisi VII DPR Jhonny Allen Marbun.

baiki keuangan PLN itu sendiri, untuk hitungannya sendiri sekitar 14 sampai 15 Trilyun,” jelas Jhonny Allen.

Jhonny Allen menyayangkan, mengapa dari setiap peristiwa demi peristiwa selalu yang terjadi adalah apabila ada masalah baru bertindak, baru membuat langkah-langkah strategis. Padahal dari segi anggaran setiap tahun disamping anggaran dari PLN itu sendiri ada APBN. Dan anehnya anggaran ini tidak terserap baik untuk pembangkit maupun untuk jaringan.

“Sebagai contoh, sekilas tadi yang dipaparkan PLN bahwa kurangnya pemeliharaan pembangkit di Labuan Angin dan Belawan. Bertambah defisit ini nggak masuk, harusnya bukan defisit yang bertambah, mestinya bertambahnya tingkat pelayanan elektrifikasi,” tegas Politisi dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara.

Menurutnya, ini berbanding terbalik dengan penyediaan anggaran dengan kondisi eksisting. Yang terjadi malah bertambahnya defisit karena kurangnya pemeliharaan. Kecuali hal ini terjadi jika anggarannya tidak ada.

“Apakah dari setiap wilayah yang menyangkut secara nasional tidak memiliki program atau *progress report* baik itu katakanlah minimal mempertahankan yang sudah ada secara konsisten dan meningkatkan elektrifikasi, ini malah bertambah defisit,” tanya Jhonny Allen.

Di APBNP, kata Jhonny Allen, diperhitungkan anggaran untuk pembangkit tidak akan terserap. Padahal banyak persoalan pembangkit yang sudah tua, sudah menurun dan kurang pemeliharaan. Namun atas permintaan anggaran daripada PLN menurut Dirjen Migas hampir 500 milyar untuk penambahan jaringan.

“Jadi khususnya untuk Sumatera Utara, karena Sumut bagian dari NKRI bagian dari nasional, sebetulnya apa sih yang menjadi kendala atas penggunaan daripada anggaran yang secara eksisting khususnya dari APBN tidak terserap sementara persoalan PLN yang disampaikan tadi adanya persoalan anggaran khususnya persoalan pemeliharaan,” tanya Jhonny Allen.

“Apakah PLN tidak memiliki program jangka pendek dan menengah di setiap wilayah melihat daripada persoalan

kelistrikkannya, baik dalam konteks jangka pendek untuk mempertahankan yang sudah ada sekaligus meningkatkan sampai dengan peningkatan elektrifikasi baik dari segi pembangkit maupun dari segi penambahan jaringan,” tanyanya lagi.

Menurut Jhonny Allen, ini mungkin yang lebih konkrit daripada penjelasan-penjelasan, sebetulnya ada masalah tapi seolah-olah tidak ada masalah. Padahal masalah itu diselesaikan bukan setelah masalah ada, harusnya masalah itu tidak boleh timbul kalau ada program-program yang konkrit dengan menggunakan anggaran.

“Ini berbalik-balik, disatu sisi Dirutnya cari anggaran, disisi lain APBN nya tidak terserap. Ini luar biasa PLN ini. Misalnya Sumut, kemarin permintaannya 125 dikasi 160an karena untuk menyangkut masalah jaringan di daerah Tobasa, Tapanuli dan Kupang,” papar Jhonny Allen.

Untuk soal APBN harusnya bisa mengatasi hal-hal yang sifatnya teknis jangka pendek apabila memiliki program progresif yang betul di setiap wilayah Indonesia. “Kalau memang perlu kita tambah, tapi bagaimana kita mau tambah kalau setiap tahun anggaran tidak terserap, tahun 2012 saja tidak terserap berapa trilyun misalnya. Saya minta penjelasan antisipasi-antisipasi jangka pendek dari PLN,” katanya. (sc)

DPR Siap Bantu Sumut Atasi Krisis Energi



Ketua Komisi VII DPR Sutan Bathoegana.

Komisi VII DPR RI menyatakan siap membantu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengatasi krisis energi di daerah Sumatera Utara.

“Kami siap mendukung pengoptimalan seluruh potensi cadangan sumber-sumber pasokan listrik maupun persoalan kelangkaan solar dan gas di Sumut,” kata Sutan Bathoegana saat pertemuan dengan Wakil Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi di Medan, Kamis (25/7)

Menurut Sutan, upaya membantu mencari solusi mengatasi krisis energi Sumut tahap awal akan dilakukan Komisi VII dengan melakukan pertemuan dengan kementerian dan perusahaan yang menangani gas dan listrik untuk mencari tahu permasalahannya secara lebih jelas.

“Kami misalnya akan berkoordinasi dengan Pertamina, PLN, PGN dan termasuk SKK Migas” katanya.

Pemerintah Provinsi Sumut sendiri diharapkan bisa berkoordinasi dengan pemerintah kota / kabupaten yang memiliki cadangan sumber daya panas bumi dan lainnya.

Wakil Gubernur Sumut, Erry Nuradi menyebutkan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) Sumut tahun 2013 untuk premium 1,6 juta kilo liter dan jenis solar sebanyak 1,028 juta kilo liter.

Sementara realisasi penyaluran solar hingga Juni rata-rata sudah lebih tinggi sekitar empat persen di atas kuota.

Dalam pertemuan tersebut, Tengku

Erry juga menjelaskan masalah krisis gas dimana dari minimal kebutuhan gas sekitar 20 juta standar kaki kubik per hari (mmscfd), namun yang tersedia tinggal tujuh juta mmscfd dan itu membuat industri kewalahan.

Minimnya pasokan gas itu selain akibat tidak beroperasinya lapangan gas alam Glagah Kambuna di *outsources* Langkat juga disebabkan belum berproduksinya Sumur Benggala A yang menyimpan cadangan gas alam baru yang ditemukan PT Pertamina Pangkalan Susu sebesar 6 mmscfd akibat masalah perizinan.

Sementara menyangkut listrik, menurut dia, peningkatan pemakaian daya listrik yang sekitar tujuh persen per tahun belum mampu dipenuhi PLN.

Pada kondisi Maret 2013 dijelaskan daya mampu pasok listrik dari PT.PLN untuk wilayah Sumut hampir sama dengan beban puncak yakni sebesar 1.653 MW sehingga pemadaman listrik selalu terjadi.

“Masalah krisis energi Sumut perlu bantuan DPR RI untuk mencari solusi,” katanya. (sc)

Suap Pengacara ke Oknum MA, Pintu Mengungkap Mafia Peradilan

Anggota Komisi III DPR RI Taslim mengatakan tidak berlebihan kalau publik berharap keberhasilan KPK mengungkap dugaan suap oknum pegawai MA oleh pengacara dapat menjadi pintu membongkar mafia peradilan. Oleh karenanya ia mendukung penuh upaya institusi anti rasuah ini untuk menelusuri jaringan mereka sampai ke tingkat yang paling tinggi.

“Saya kira setelah terjadi tertangkap tangan itu KPK harus mendalami sampai ke akar-akarnya. Pengacara yang menyuap tentu bukan keputusan dia sendiri, staf MA tentu ada jaringannya. Bila pion saja yang ditangkap rajanya tidak, masalah tidak akan selesai, mesti ditelusuri lebih jauh. Ini bisa jadi pintu mengungkap mafia peradilan,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Senin (29/7/13).



Anggota Komisi III DPR Taslim.

Ia meminta keberhasilan KPK mengungkap suap jangan hanya sekedar melakukan *shock therapy*, karena tidak akan mampu membongkar jaringan mafia peradilan yang sudah mapan. Politisi FPAN ini mengaku sering

mendapat laporan soal suap menyuap dalam menyelesaikan perkara di berbagai tingkat pengadilan.

“Aksi mafia peradilan itu sudah seperti rahasia umum. Sekarang momentumnya tepat ketika MA menyatakan ingin bersih-bersih seharusnya itu didukung semua pihak Komisi Yudisial, para pengacara dan sekarang KPK. Kita di DPR minta kasus ini harus tuntas siapa yang menyuap dan disuap dan para aktor atau mafia dibaliknya,” lanjutnya.

Dugaan suap ini mengemuka setelah KPK menangkap oknum pegawai MA Djodi Supratman dan menyita uang Rp. 128 juta. Setelah ditelusuri uang tersebut berasal dari pengacara Mario C. Bernardo dari kantor Hotma Sitompul. (iky) foto:od/parle.

Tanding Lawan Tim Eropa, Positif Untuk Timnas Indonesia

Dalam sebulan terakhir ini, Indonesia kedatangan tim-tim sepakbola dari Eropa. Mereka berkunjung dalam rangkaian tur pra musim ke beberapa negara Asia. Berdasarkan pantauan Tim Parle di berbagai pemberitaan media, banyak pihak yang menyambut positif kedatangan kesebelasan ini ke Indonesia. Namun, ada juga yang menilai ini lawan yang tak sepadan untuk Timnas Indonesia.

Anggota Komisi X Dedi Gumelar menyatakan bahwa bertanding dengan tim-tim Eropa, merupakan hal yang positif untuk perkembangan persepakbolaan Indonesia. Menurutnya, pertandingan ini bisa menjadi ajang mengasah kemampuan pemain Timnas.

“Saya kira ini menjadi bagus untuk Indonesia, apalagi



Anggota Komisi X DPR Dedi Gumelar.

jika PSSInya juga solid. Soal kalah menang urusan kedua. Paling tidak walaupun bertanding di negeri sendiri, mereka (pemain Timnas) punya pengalaman internasional, karena bertanding melawan tim yang memiliki standar dunia. Dan ini juga sebagai evaluasi pemain, dengan hasil pertandingan yang berbeda, bisa dicari dimana kurangnya,” jelas Dedi ketika ditemui di Ruang Rapat Komisi X usai raker dengan

Kemendikbud, Senin (29/7) sore.

Pria yang akrab disapa Miing ini menambahkan, pertandingan ini juga memberikan dampak positif secara psikologis. Pertama, tim-tim Eropa menjadi tahu kalau Indonesia memiliki PSSI.

“Kedua, pemain Indonesia memiliki pengalaman bermain dengan standar dunia. Dengan banyaknya frekuensi pertandingan, dapat mengasah kemampuan pemain. Frekuensi bertanding ini menjadi sangat penting. Menurut saya, kekalahan Timnas ketika bertanding dikarenakan memiliki standar yang berbeda,” tambah Miing.

Namun politisi PDI Perjuangan ini mengingatkan, bertanding bukan hanya *melulu* dengan tim Eropa. Timnas juga perlu bertanding dengan tim-tim sepakbola Asia. Pasalnya, untuk pertandingan di tingkat negara anggota AFC (*Asian Football Confederation*), Timnas pasti bertemu dengan sesama negara Asia.

“Frekuensi bertanding dengan sesama dengan Asia harus lebih sering, karena kita bertemu di AFC. Gak mungkin kita bertanding lawan Inggris untuk saat ini, karena kita belum lolos untuk ke Piala Dunia,” seloroh Dedi. (sf) foto: od/parle.

MOS Harus Hindari Kontak Fisik

Masa Orientasi Siswa (MOS) kembali memakan korban. Kali ini, Aninda Puspita (16), siswi SMKN1 Pandak Bantul, Jumat (19/7) sore, meninggal dunia saat mengikuti MOS di sekolahnya. Sebelum peristiwa terjadi, warga Daleman, Gadingharjo, Sanden, Bantul, Yogyakarta ini sempat dihukum *squat jump* karena dinilai melakukan pelanggaran peraturan peserta MOS.

Hal ini turut mengundang perhatian dari Komisi X, yang membidangi pendidikan. Ketua Komisi X Agus Hermanto menyangkan hal ini sampai terjadi. Ia menilai, seharusnya MOS jangan sampai menggunakan kontak fisik.

“MOS harus menghindari kontak fisik. Ini kesalahan yang dibuat oleh penyelenggara. Penyelenggara harus bertanggung jawab, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Kedepannya, tidak boleh ada lagi kejadian seperti ini,” sesal Agus ketika dihubungi Tim Parle via telepon, Kamis (25/7).

Politisi Demokrat ini menilai sebenarnya tidak perlu ada MOS model seperti ini, sehingga ini harus benar-benar ditinjau. Ia menyarankan mungkin MOS bisa dengan membagi wawasan dan pengetahuan, melalui *workshop* atau seminar. Sehingga MOS dapat menambah wawasan siswa. Selain itu, tambahnya, juga bisa melalui olahraga ringan maupun kegiatan keagamaan seperti mengaji.



Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto.

Menindaklanjuti kejadian ini, Agus berjanji ketika selesai reses nanti, Komisi X akan melakukan Rapat Kerja dengan Kemendikbud untuk membahas terkait dengan kejadian di Bantul ini, dan permasalahan lain yang ditemukan anggota dewan di dapil masing-masing.

“Komisi X akan melakukan peninjauan dengan Kemendikbud. Tidak boleh lagi terjadi seperti ini. Ini akan kami pertanyakan kepada Kemendikbud. Dan kami minta Mendikbud untuk menindaklanjuti secara serius,” tegas politisi dari Dapil Jawa Tengah I ini. (sf) foto: wy/parle.

Pemudik Diimbau Manfaatkan Layanan Angkut Motor Gratis

Calon pemudik yang berencana menggunakan sepeda motor pada Lebaran 2013, diminta untuk mengurungkan niatnya dan beralih menggunakan layanan angkut motor gratis yang disediakan pemerintah. Data menunjukkan pada arus mudik sebelumnya sepeda motor bukanlah sarana transportasi yang aman karena telah merenggut banyak jiwa.

“Tahun 2012 angka kecelakaan tinggi sekali 908 meninggal, 70 persen pengguna roda dua. Itulah sebabnya Komisi V menyetujui anggaran untuk mengangkut gratis 38 ribu sepeda motor pemudik ke Jawa dan Sumatera, agar penggunaan sepeda motor bisa berkurang,” kata Wakil Ketua Komisi V Muhidin M. Said dalam dialog radio ‘Bersama Wakil Rakyat’ kerja sama Pemberitaan Setjen DPR RI dengan RRI Pro3 Nasional di Jakarta, Jumat (26/7/13).

Seluruh sepeda motor tersebut dijamin pemerintah akan sampai ke lokasi tujuan mudik dengan aman pada waktunya dengan menggunakan truk, kereta api, kapal Pelni dan TNI AL. Se-



Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M. Said

mentara para pemudik dapat menggunakan layanan pulang kampung gratis yang juga disediakan pemerintah, perusahaan BUMN, swasta, partai politik serta sejumlah pihak lain yang akhir-akhir ini semakin banyak menyediakan layanan tersebut.

“Agar memudahkan proses administrasi calon pemudik segera saja mendaftarkan diri ke Kementerian Perhubungan atau Dinas Perhubungan, saya tahu pendaftaran di buka 1x24 jam. Syaratnya mudah yang penting

bawa KTP, SIM-nya harus ada, STNK harus jelas, ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak dipungut biaya semua *free*, ini pelayanan yang luar biasa koordinasi antara Menteri Perhubungan dengan Komisi V,” tandas wakil rakyat dari dapil Sulteng ini.

Ia berharap program Angkut Motor Gratis ini selanjutnya tidak hanya menjadi program pemerintah tetapi juga menjadi bagian dari program mudik gratis oleh perusahaan BUMN dan swasta. Politisi Fraksi Partai Golkar ini memaklumi sepeda motor merupakan alat transportasi favorit dan serba guna bagi sebagian masyarakat, tetapi harus disadari kendaraan ini sangat tidak aman untuk jarak jauh.

“Nanti setelah sampai di kampung silahkan digunakan lagi sepeda motornya untuk silaturahmi ke rumah saudara, karib kerabat, nanti pada waktu kembali disiapkan lagi layanan angkut gratis. Kita mau arus mudik kali ini lebih aman, lancar, angka kecelakaan bisa ditekan,” demikian Muhidin. (iky). Foto: wy/parle.

Jalin Silaturahmi, Ketua DPR Gelar Buka Puasa Bersama



Ketua DPR Marzuki Alie berbincang dengan Ketua ISNU Ali Masykur Musa dan Presiden ICMi Nanat Fatah Natsir.

Dalam rangka menjalin silaturahmi, Ketua DPR Marzuki Alie mengundang sejumlah organisasi masyarakat untuk berbuka puasa bersama di rumah dinas, Jalan Widya Chandra III No 10, Jakarta. Acara dimulai pukul 17,30 WIB, Kamis (25/7) sore.

Hadir dalam acara ini, Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama (ISNU) Ali Masykur Musa beserta jajaran, dan Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Nanat Fatah Natsir. Selain itu, hadir pula segenap anggota Pergerakan Wanita Nasional (Perwanas), dan jajaran direksi PT GPI.

“Ini bagian dari menyambung si-

laturahmi, yang selama ini sebenarnya sudah terbangun. Melalui momen Ramadan ini, kita harus berbagi,” ujar Marzuki usai acara buka puasa.

Marzuki menambahkan, buka puasa ini merupakan buka puasa bersama yang ketiga. Sebelumnya, buka puasa bersama digelar bersama Presiden,

Wapres dan segenap Menteri Kabinet.

Ketum ISNU menyambut baik acara ini. Ia menilai budaya silaturahmi dalam sistem sosial negara ini sudah berkurang. Sehingga, sebagai salah satu organisasi umat Islam, sudah seyogyanya untuk memberi contoh kepada masyarakat luas untuk saling

bersilaturahmi.

Usai menggelar buka puasa bersama, Marzuki langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk menyambangi Tenaga Pembangunan (TP) Sriwijaya. (sf)Foto:wahyu/parle.

Masa Jabatan Anggota LPSK Perlu Diperpanjang



Anggota Komisi III DPR M. Nurdin.

Anggota Komisi III DPR RI M. Nurdin mengingatkan Presiden SBY patut segera menerbitkan surat keputusan perpanjangan masa jabatan anggota LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Institusi ini terancam mengalami kekosongan jabatan karena masa kerja mereka segera berakhir 8 Agustus nanti, sementara proses *fit and proper test* anggota baru belum dilaksanakan.

“Tidak mungkin DPR melaksanakan *fit and proper test* sebelum tanggal 8 Agustus, jadi supaya jangan ada kekosongan ya sebaiknya Presiden memperpanjang masa jabatan mereka,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Senin (29/7/13).

Politisi FPDIP ini menyebut setelah masa reses berakhir 16 Agustus nanti, setidaknya perlu waktu 3 bulan untuk menyelesaikan seluruh proses uji kepatutan dan kelayakan yang akan berlangsung di Komisi III. Ia berharap daftar nama 21 kandidat yang telah diseleksi oleh pemerintah dapat segera diserahkan ke DPR.

“Ada usulan diperpanjang 3 bulan, saya pikir cukup, setelah masa reses kita segera melangsungkan *fit and proper test*,” lanjut purnawiran Polri berbintang tiga ini.

Pada bagian lain ia mengaku perlu mendorong LPSK untuk bekerja lebih baik dalam memberikan rasa aman kepada para saksi dan korban yang diharapkan dapat membantu penegak hukum dalam mengungkap kejahatan, termasuk korupsi yang telah menggerogoti bangsa ini. Ia mencontohkan LPSK-nya Amerika, *US Marshal* yang dinilai telah mapan secara organisasi.

“Salah satu indikator keberhasilan LPSK adalah apabila semakin banyak pihak yang tidak takut membeberkan kejahatan yang diketahuinya. Kenapa? karena merasa yakin akan mendapat perlindungan. Perlu penguatan dibidang legislasi memang, ini yang perlu kita pikirkan bersama,” demikian Nurdin. (iky) foto:wy/parle.

Ketua DPR Peringati Nuzulul Qur'an Di Masjid Agung Palembang

Ketua DPR RI Marzuki Alie menghadiri acara Peringatan Nuzulul Qur'an di Masjid Agung Palembang sesuai shalat taraweh, Jum'at (26/7) malam. Selain Marzuki, turut hadir unsur Muspida Sumatera Selatan, unsur Muspida Kota Palembang dan pihak terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Marzuki Alie menekankan pentingnya masjid sebagai tempat untuk melaksanakan semua kegiatan yang baik bagi umat Islam tidak hanya sholat. Terutama bagi anak-anak bangsa yang menjadikan masjid sebagai sumber tempat

kegiatan agama sesuai fungsinya.

“Peringatan Nuzulul Qur'an ini menjadi momentum bagi kita untuk kembali ke Al Qur'an dan ajarannya. Hal-hal yang tadinya tidak sesuai dengan ajaran Al Qur'an seyogyanya segera kita

luruskan. Dengan mempelajari dan mengamalkan Al Qur'an insya Allah kehidupan kita akan menjadi lebih baik," ungkap Marzuki.

Di sela-sela acara Peringatan Nuzulul Qur'an, Ketua DPR juga didaulat untuk meresmikan peluncuran Masjid Agung Palembang TV (MAP TV). "Melalui media televisi ini para jamaah tentunya dapat melihat gerak-gerik imam meskipun berbeda ruangan. Jadi ini pemanfaatan teknologi dalam berdakwah," ujar Marzuki.

Lebih lanjut Marzuki mengatakan kalau dulu baru sebatas memanfaatkan siaran radio dengan hanya suara, tapi sekarang bisa didengar dan dilihat langsung. Ke depan siaran sholat di Masjid Agung Palembang bisa melalui MAP TV, sama seperti di Masjid Istiqlal Jakarta," kata Marzuki.

Pada peringatan Nuzulul Qur'an 18



Ketua DPR RI Marzuki Alie menghadiri acara Peringatan Nuzulul Qur'an di Masjid Agung Palembang.

Ramadhan 1434 H tersebut juga diisi dengan ceramah agama oleh Ustadz H. Ahmad Taufik Hasnuri. Jamaah yang memenuhi Masjid Agung tampak khusyuk namun sesekali diselingi gelak

tawa lantaran isi ceramah yang jenaka. Sementara diluar masjid juga dimeriahkan oleh iring-iringan pawai mobil hias Festival Palembang Darussalam 2013. (Od) Foto: Odjie/parle.

DPR Setujui Penggunaan Anggaran Pembangunan Gedung PTN

Komisi X DPR menyetujui penggunaan anggaran kegiatan pembangunan gedung/sarana prasarana Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebesar Rp 3,9 triliun dalam APBN Tahun 2013 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini sebagai tindak lanjut surat dari Menteri Keuangan yang telah membuka blokir alokasi anggaran pembangunan.

Dalam raker yang digelar pada Senin (29/7) sore antara Komisi X dengan Mendikbud M Nuh, dibahas Surat Menkeu tertanggal 2 Juli 2013 perihal Pembukaan Blokir Kegiatan Pembangunan Gedung/Sarana Prasarana Baru PTN dan Pengadaan Alat Laboratorium/Sarana Prasarana Lainnya PTN Kemendikbud tahun 2013. Selain itu, juga dibahas Pembukaan Blokir Kegiatan Lanjutan Pembangunan Gedung/Sarana Prasarana PTN Kemendikbud.

"Sikap Komisi X menyetujui penggunaan anggaran kegiatan pembangunan gedung/sarana prasarana dengan rincian, pertama, kegiatan lanjutan yang berupa penyelesaian atau penyelesaian sebagian pembangunan gedung/sarana prasarana PTN sebesar Rp 1.526 miliar," jelas Wakil Ketua Komisi X Syamsul Bachri ketika memimpin raker di Ruang Rapat Komisi X, Gedung Nusantara I.

Rincian berikutnya, Komisi X menyetujui kegiatan pembangunan gedung/sarana prasarana baru PTN sebesar Rp 810 miliar. Kemudian, Rp 1.563 miliar disetujui untuk kegiatan



Wakil Ketua Komisi X DPR Syamsul Bachri.

an pengadaan alat laboratorium/sarana prasarana lainnya di PTN.

"Rincian kegiatan mengacu pada RKA KL TA 2013 sebagaimana persetujuan Komisi X pada 21 Desember 2012 dan 8 Maret 2013," tambah Syamsul. (sf) Foto: od/parle.

Napi Narkoba Kakap Sebaiknya Diisolasi



Anggota Komisi III DPR Syarifudin Sudding.

Anggota Komisi III DPR RI Syarifudin Sudding menilai narapidana narkoba kelas kakap perlu mendapat penanganan serius karena memiliki jaringan dan uang yang dapat mempengaruhi petugas. Ia menyebut langkah yang

dapat diambil diantaranya melakukan isolasi.

“Narapidana narkoba membeli fasilitas lapas sudah berulang kali terjadi, itu karena mereka punya jaringan dan uang. Lebih baik mereka diisolasi saja di lapas militer atau kalau perlu membangun penjara khusus di pulau terpencil,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Selasa (30/7/13).

Politisi FP Hanura ini menilai sejumlah *shock therapy* yang dilakukan Wamenkumham Denny Indrayana seperti inspeksi mendadak dan pemasangan kamera CCTV, sejauh ini tidak berdampak signifikan. “Sudah menjadi rahasia umum yang punya uang berkuasa di Lapas sehingga petugas tergiur memberikan kemewahan dan

dispensasi. Sekarang solusinya diputus saja semua,” tandasnya.

Sorotan terhadap Lembaga Pe-masyarakatan kembali menyeruak setelah Vanny Rosyane mengungkap-kan sering mendapat layanan khusus saat berkunjung ke Lapas Cipinang, Jakarta. Mantan model yang memiliki hubungan dengan terpidana mati kasus narkoba Freddy Budiman menyebut ruangan mewah dilengkapi TV, AC dan kulkas bisa dipesan salah satunya adalah ruang Kalapas.

“Sudah sepantasnya Kalapas Cipinang dicopot dari jabatannya, kalau perlu dipecat dengan tidak hormat kalau terbukti menjualbelikan fasilitas di penjara,” pungkas Sudding. (iky) foto:wy/parle.

DPR Sesalkan Penyadapan Terhadap Presiden RI

Anggota Komisi I Hayono Isman menyesalkan atas disadapnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan rombongan saat menghadiri pertemuan G20 di London, Inggris, pada 2009 lalu. Ia menilai ini masalah yang serius, sehingga pihaknya akan memanggil Menteri Luar Negeri, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kepala Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk dimintai keterangan.

“Ini masalah serius. Lembaga dan institusi yang berkaitan soal penyadapan, perlu dievaluasi dan akan dipertanyakan ke Lemsaneg, BIN, dan Kementerian Luar Negeri. Usai reses akan kita panggil,” ujar Hayono di Kompleks Parlemen, Senen (29/7).

Ia menambahkan, institusi seperti Lemsaneg, BIN dan perwakilan di luar negeri seharusnya memastikan Presiden tidak disadap. Menurutnya, penyadapan terhadap presiden bisa terjadi karena pihak internal tidak mampu mencegah.

“Ini kelengahan internal kita yang perlu dikoreksi, bukan menyalahkan negara lain. Sebab negara lain pasti ingin menyadap. Pertanyaannya apakah kita mampuantisipasi atau tidak,” tanya Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyala-



Anggota Komisi I DPR Hayono Isman.

takan bahwa penyadapan ini tidaklah etis dalam hubungan antar negara. “Dalam segi etika dan tata krama hubungan antar negara, hal itu tidak etis. Kemenlu harus memberikan catatan kepada negara yang menyadap,” ujar Pramono. (sf) foto:od/parle.

Vonis Ringan Terjadi Karena UU Tipikor Beri Ruang Jatuhkan Vonis tak Maksimal

Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai, terjadinya vonis ringan pengadilan tipikor terhadap koruptor karena pasal-pasal dalam UU Tipikor membuka ruang untuk orang memberikan hukuman yang tidak maksimal.

“Kita tahu orang yang melakukan tindak pidana korupsi adalah orang-orang yang sudah punya uang. Untuk mengorupsi saja dia berani, apalagi untuk mendapatkan hukuman yang tidak maksimal, dia bisa melakukan langkah-langkah ilegal,” katanya di Gedung DPR Selasa (30/7).

Hal itu dipertanyakan sehubungan vonis ringan yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor terhadap kasus-kasus korupsi sebagaimana diungkap ICW. Lembaga ini mencatat, sepanjang semester II tahun 2010 hingga semester



Wakil Ketua DPR Pramono Anung.

I tahun 2013 ini, terdapat 143 terdakwa korupsi yang divonis bebas dan 185 terdakwa divonis kurang dari setahun penjara.

ICW juga merilis bahwa 384 terdakwa korupsi dihukum penjara 1-5 tahun, lalu terdapat 35 orang yang divonis 5-10 tahun penjara dan hanya 5 orang

yang divonis diatas 10 tahun penjara.

Menuut Pramono, dalam UU Tipikor juga dibuka ruang bagi jaksa tipikor untuk banding. “Saya lihat semua yang hukumannya ringan itu akan naik banding hingga ke MA. Dan lembaga inilah, meski kemarin ada kasus tertangkap tangan penyusunan, tetapi saya masih menaruh harapan yang tinggi kepada teman-teman di MA sebagai penjaga guardian dari hukum kita,” jelas Pramono.

Ditegaskan lagi, kebanyakan dari kasus-kasus yang terkena UU Tipikor kemudian naik banding ke atas, minimal akan disamakan hukumannya, bahkan ada yang ditambah hukumannya. “Saya masih menaruh harapan terhadap hal itu,” kata Pramono menambahkan. (mp,mh)foto:wahyu/parle.

Pimpinan DPR Terima 12 Nama Calon Hakim Agung



Ketua DPR Marzuki Alie didampingi Wakil Ketua Priyo Budi Santoso dan Sohibul Iman menerima Ketua Komisi Yudisial RI Suparman Marzuki.

Pimpinan DPR RI mengapresiasi dan menyambut baik 12 nama calon Hakim Agung yang telah ditetapkan oleh

Komisi Yudisial. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso sesaat setelah Pimpinan DPR RI

menerima daftar 12 calon Hakim Agung dari Ketua Komisi Yudisial, Suparman Marzuki di ruang rapat pimpinan DPR RI, Selasa (30/7).

Dua belas nama calon Hakim Agung dari KY tersebut adalah Arofah Windiani yang merupakan ahli Perdata, Bambang Edy Sutanto Soedewo, ahli Hukum Tata Usaha Negara, Eddy Army, Hartono Abdul Murad, Heru Iriani, Is Sudaryono, Manahan M.P Sitompul, Maruap Dohmatiga Pasaribu, Mulijanto, Sudrajad Dimiyati, Sumardijatmo, dan Zahrul Rabain.

Dikatakan Priyo, dari 12 nama tersebut akan dilakukan uji kelayakan dan kepatutan untuk memilih tujuh nama, yang nantinya akan mengisi kekosongan jabatan Hakim Agung di Mahkamah Agung.

“Kami (Pimpinan DPR) akan melaku-

kan rapat pimpinan dan kemudian akan mendelegasikannya kepada Komisi III untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan pada 12 nama tersebut, Insya Allah pada masa persidangan berikutnya proses tersebut akan berjalan,” jelas Priyo.

Ditambahkan Suparman, proses seleksi dilakukan selama enam bulan dan terakhir proses wawancara. Diakui Suparman, berdasarkan Undang-undang seharusnya KY menyerahkan daftar calon Hakim Agung tiga kali lipat dari jumlah yang dibutuhkan. Sejauh ini kebutuhan akan Hakim Agung berjumlah 7. Jadi seharusnya nama yang diajukan KY adalah berjumlah 21 orang. Namun, setelah dilakukan proses seleksi, hanya 12 nama yang bisa diajukan KY ke DPR untuk menjadi calon Hakim Agung.

“Dari 23 nama, hanya 12 nama yang bisa kami ajukan ke DPR, karena kita tegas dan konsisten untuk terus mempertahankan prinsip integritas sebagai pilihan utama untuk menjadi wakil Tuhan di Mahkamah Agung. Setelah itu kualitas sebagai tempat yang kedua. Sebenarnya yang terbaik adalah kombinasi antara integritas dan kualitas itu, tetapi realitanya bangsa ini tampaknya sulit sekali mencari orang-orang yang memiliki dua kualifikasi tersebut. Dan kita tidak bisa memaksakan hal itu, kepentingan bangsa dan Negara ini harus diutamakan, lebih dari sekedar memenuhi kuota. Itu yang kita pegang teguh,” papar Suparman Marzuki.

Sementara itu Ketua DPR RI Marzuki Alie yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa pola ini sebenarnya sudah dilakukan saat KY

diketahui oleh Erman Suparman.

“Waktu itu kami sampaikan jangan dipaksakan, misalnya dari tujuh kebutuhannya, harusnya calonnya 21, tapi nyatanya hanya ada 10-12 orang memenuhi kualifikasi, maka 10 atau 12 orang itu saja yang disampaikan ke DPR, karena apa? Kalau hanya satu calon yang sebenarnya tidak memenuhi kualifikasi dipaksakan untuk dimasukkan namanya oleh KY, dan kemudian kebetulan terpilih oleh DPR, maka MA nantinya akan diisi oleh orang yang malah akan membuat masalah dalam penegakan hukum. Karena DPR ini kan lembaga politik, jadi pilihannya pun penuh pertimbangan politik. Jadi kalau memang tidak cukup jangan dipaksakan,” jelas Marzuki Alie. (Ayu) foto:wy/parle

DPR Akan Audit Perbaikan Jalur Mudik

Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan audit terkait dengan perbaikan jalur mudik, baik di jalur Pantai Utara (Pantura) maupun jalur Selatan. Hal ini sesuai dengan usulan Komisi V, sebagai komisi yang membidangi pekerjaan umum dan perhubungan.

“Pimpinan DPR menyetujui usulan Komisi V untuk melakukan audit terhadap perbaikan jalan. Sekarang kan kita punya Undang-undang tentang Jalan (UU No 38 Tahun 2004), sehingga kita punya payung hukum untuk mengaudit jalan yang ada di Pantura maupun di Selatan,” tegas Pramono ketika ditemui Tim Parle beberapa hari yang lalu di Kompleks Parlemen.

Politisi PDI Perjuangan ini menyangkan, selama ini, untuk mengatasi jalur mudik hanya selalu antisipatif atau persoalan jangka pendek saja. Selain itu, ia juga menyayangkan perbaikan selalu dilakukan tiap tahunnya, namun tak kunjung selesai. Bahkan, sampai menjelang arus mudik, pekerjaan perbaikan belum selesai.

“Yang kita tahu, perbaikan jalur Pantura dan Selatan selalu berkaitan dengan arus mudik. Tidak dipersiap-



Wakil Ketua DPR Pramono Anung.

kan sejak awal ketika masyarakat belum mudik. Maka dengan demikian ini menjadi catatan tersendiri untuk DPR. Perbaikan hanya itu-itulah saja, di beberapa daerah belum selesai perbaikannya. Ini sangat disayangkan,” imbuh Pramono.

Seharusnya, tambah Pramono, perbaikan dapat dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Termasuk infrastruktur jembatan yang rusak maupun *ambrol*.

“Di beberapa daerah seperti jembatan yang *ambrol*, ini menunjukkan tidak ada persiapan dari pemerintah. Dengan demikian, ini yang paling dirugikan adalah masyarakat. Untuk itu, Pimpinan DPR akan meneruskan surat dari Komisi V untuk mengaudit jalan yang digunakan masyarakat untuk mudik,” tegas Pramono. (sf) foto:wy/parle.

Komisi III Akan Tetap Seleksi Calon Hakim Agung Dengan Metode Tanya Jawab



Wakil Ketua DPR Sohibul Iman didampingi Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika (Kanan) dan Ketua Komisi Yudisial RI Suparman Marzuki.

Komisi III DPR RI akan melakukan proses seleksi calon Hakim Agung tetap dengan metode *Fit and Proper Test* atau Uji Kelayakan dan Kepatutan, yang salah satunya melalui proses Tanya jawab. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi III, Gede Pasek Suardika, Selasa (30/7) usai mendampingi Pimpinan DPR RI menerima daftar 12 nama calon Hakim Agung dari Ketua Komisi Yudisial (KY).

Pasek menilai metode wawancara atau tanya jawab dalam proses seleksi masih cukup efektif digunakan. Hal itu terbukti dari pengalaman sebelumnya, dimana ada calon Hakim Agung yang

melakukan kesalahan saat menjawab pertanyaan dari anggota dewan.

“Sebenarnya tujuan dari wawancara itu kan untuk memperlihatkan ke publik tentang integritas dan kualitas para calon Hakim Agung. Melalui anggota Komisi III, masyarakat bisa menanyakan sesuatu kepada para calon, dan saat itu juga masyarakat dapat melihat jawabannya secara langsung. Jadi sifatnya benar-benar terbuka. Dari pengalaman kan sudah terbukti, ada satu dua calon Hakim Agung yang salah kata atau salah ucap saat tanya jawab, dan disinilah proses seleksi berlangsung, mental juga berpengaruh,”

jelas Pasek.

Namun sebelum sampai pada proses tersebut, Pasek menambahkan, pihaknya belum mengetahui apakah nama yang akan sampai ke Komisi III akan tetap berjumlah 12 orang. Karena nama-nama yang diserahkan KY ke Pimpinan DPR RI sebelum masuk ke Komisi III terlebih dahulu harus disampaikan pimpinan kepada anggota dewan dalam Sidang Paripurna. Baru setelah itu akan diserahkan kepada Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Oleh Bamus barulah nama-nama tersebut diserahkan kepada Komisi III untuk dilakukan proses *Fit and Proper Test*.

Dari 12 nama calon Hakim Agung, Pasek belum bisa memastikan siapa-siapa saja yang memiliki peluang dan kesempatan paling besar untuk terpilih menjadi Hakim Agung.

“Dari 12 nama tersebut, setelah melalui proses seleksi sebelumnya bisa saja saat masuk ke Komisi III hanya tinggal 10 nama saja. Tapi bisa juga tetap 12 nama. Disini saya mencoba memaksakan diri saya untuk tidak melihat nama, yang nantinya malah akan mempengaruhi cara berpikir saya. Kita ikuti prosesnya saja dulu, netral sajalah dulu,” ungkap Politisi dari Fraksi Partai Demokrati. (Ayu) foto:wy/parle.

Ketua DPR Buka Puasa Bersama Wong Kito Galo

Ketua DPR RI Marzuki Alie didampingi istri, Asmawati Marzuki kembali menggelar acara buka bersama di rumah dinas, Jalan Widya Chandra III No 10, Jakarta. Dalam kesempatan kali ini, tamu yang diundang adalah *wong kito galo* (orang kita semua, sebutan untuk orang Sumatera Selatan, RED), diantaranya Tenaga Pembangunan (TP) Sriwijaya, Tim Sekoci, dan Tokoh Masyarakat Sumatera Selatan.

“Ini sebagai kesempatan untuk berkumpul dan berinteraksi. Kita buka dengan berbagai komunitas. Kebetulan hari ini dengan TP Sriwijaya. Intinya adalah silaturahmi jangan sampai putus, silaturahmi dengan keluarga dan sahabat,” ujar Marzuki usai buka puasa bersama, Selasa (30/7) petang.



Ketua DPR RI Marzuki Alie.

Dalam sambutannya, Marzuki menyampaikan ucapan terima kasih kepada undangan yang telah hadir. Ia juga turut senang, pasalnya dalam buka puasa bersama kali ini ia kedatangan sahabat lama, yaitu KH Ahmad Zaini dari Pondok Pesantren Al Amin, Madura.

Usai sambutan Ketua DPR, acara dilanjutkan dengan Kultum yang dibawakan oleh KH Ahmad Zaini. Sang Ustadz, dalam kultumnya menekankan pentingnya malam Lailatul Qadar, sehingga setiap umat Muslim berusaha untuk mendapatkan malam yang jatuh pada 10 malam terakhir di bulan Ramadhan ini. (sf) foto:wy/parle.

Pantau Kesiapan Listrik Jelang Lebaran, Komisi VII Tinjau PLN Pusat



Tim Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR ke Kantor PLN Pusat.

Komisi VII DPR mengunjungi Kantor PLN Pusat bertujuan untuk memastikan kesiapan PLN dalam mengalirkan listrik di Indonesia menjelang Lebaran tahun 2013 ini.

“Kedatangan kita kali ini juga meminta keterangan PLN terkait persoalan LP Tanjung Gusta dimana mengalami pemadaman selama 11 jam sehingga memunculkan konflik di LP tersebut,” ujar Ketua Komisi VII DPR Sutan Bha-

toegana, saat mengunjungi PLN di-terima oleh Dirut PLN Nur Pamudji dan jajaran Direksi lainnya, Jakarta, Kamis, (31/7).

Menurutnya, DPR senantiasa memantau listrik di seluruh Indonesia, karena mayoritas pemadaman kerap terjadi di berbagai daerah Indonesia. “Apa yang terjadi di Sumut hampir terjadi di seluruh Indonesia, bahkan GM PLN Sumut merasa kewalahan dan terjadi defisit 150 MW di sana,” tegasnya.

Kondisi kelistrikan di Sumatera Bagian Utara sampai saat ini mengalami defisit sebesar 150 MW. Dari rencana beban puncak sebesar 1700 MW hanya tersedia daya mampu pasok sebesar 1550 MW, akibatnya terjadi pemadaman listrik secara bergiliran di Sumut. (si)/foto:iwan armanias/parle.

Komisi VII DPR Minta Task Force Atasi Krisis Listrik Sumut



Anggota Komisi VII DPR Milton Pakpahan.

Komisi VII DPR meminta task force yang keanggotaannya lintas sektor segera mengatasi persoalan krisis

kelistrikan di Sumut secara cepat dan terpadu.

“Kemarin telah dibentuk badan task force dimana kita harapkan persoalan gas mendapat prioritas untuk PLN jangan sampai tidak ada jalan ini,” ujar Anggota DPR Milton Pakpahan dari Partai Demokrat, saat Kunjungan Kerja spesifik ke Kantor PLN Pusat, diterima oleh Dirut PLN Nur Pamudji, Rabu, (31/7).

Menurut Milton, krisis listrik di Sumut dapat mengurangi indeks Sumut sehingga kurangnya ketersediaan listrik dapat membuat para investor enggan berinvestasi di Sumut

Sementara Johnny Allen Marbun (F-

PD) mengatakan, PLN memiliki sumber dana yang spesifik, artinya ada APBN, sumber dana instan, jangka pendek maupun panjang. “Seharusnya segera dilakukan langkah taktis untuk menyelesaikan persoalan Listrik khususnya di pedesaan dan Tanjung Gusta,” tambahnya.

Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatogana mendesak PLN agar menjaga ketersediaan listrik di Sumut sehingga diharapkan tidak terjadi pemadaman bergilir. “Rakyat siap membayar kepada PLN, karena itu harus ada solusi membantu daerah, bagaimanapun PLN bisa menyewa genset tapi jangan sampai keterusan bisa tekor nanti,” ujarnya. (si)/foto:iwan armanias/parle.

DPR Optimis Selesaikan Revisi KUHP

DPR RI tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) meskipun memerlukan waktu yang cukup lama dan cukup berat. Hal ini menyangkut persoalan pokok UU induk yang dapat berpengaruh terhadap sistem hukum di Indonesia.

Pernyataan tersebut dikemukakan Ketua Komisi III DPR, Gede Pasek Suardika, dalam diskusi yang membahas perkembangan Revisi Rancangan Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pembahasan masih terus berjalan di Komisi III DPR, hadir pula menjadi narasumber Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia Akhlar Salmi, di gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/7).

Permasalahan menyangkut pasal yang menjadi perdebatan publik terkait dengan RUU KUHP ini, menurut Pasek, jumlahnya mencapai 700 pasal. Sehingga kata dia, diperlukan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan pembahasan RUU tersebut.

“Apalagi sekarang baru sebatas turun ke daerah, karena banyak perbedaan pengetahuan, khususnya terkait masalah pidana, termasuk soal peraturan hukum adat, dan lain-lain,” ujar politisi Partai Demokrat ini.

Pasek juga menyinggung mengenai beberapa pasal yang dinilai krusial, diantaranya pasal perzinahan dan penyadapan. “Ada beberapa pasal yang hingga kini masih menjadi perdebatan panjang. Pasal yang mengatur mengenai perzinahan, masih menjadi perdebatan apakah masuk dalam ranah pidana atau sanksi sosial,” ujarnya.

Menurut Pasek, perzinahan harusnya bisa diselesaikan dengan hukum adat yang memberikan sanksi sosial kepada pelakunya, begitu juga dengan pasal mengenai santet yang sebetulnya mengatur tentang penipuan menggunakan bantuan gaib. “Soal penyadapan, juga menjadi perdebatan apakah berlaku umum di mana KPK bisa masuk ke dalamnya, begitu juga dengan pasal



Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika.

hukuman mati dan penghinaan presiden,” tegasnya.

Terkait persoalan kewenangan penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selama ini kerap diperdebatkan, juga menjadi pembahasan yang cukup panjang. “Saya tetap mendukung penguatan lembaga penegakan hukum seperti KPK, Kepolisian, Kejaksaan, maupun Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penyadapan. Hanya saja, penyadapan itu perlu diatur lebih detil, khususnya terkait dengan hal-hal yang bersifat luar biasa. Hal itu dimaksudkan agar bisa diawasi dan tidak menyalahgunakan kewenangan penyadapan yang diberikan dalam RUU KUHP yang sedang dibahas di DPR ini,” ujarnya.

Dia menjamin, tidak ada niat untuk melemahkan KPK dengan mengurangi kewenangan penyadapan. Namun ia mengkritik KPK yang selama ini melakukan penyadapan terhadap seribuan orang, tetapi baru dua kasus yang berhasil diungkap. Sementara kasus besar tidak tertangkap oleh KPK.

“Ada metodologi pengawasan dalam penyadapan itu, nanti untuk menjaga ketertiban internal KPK sendiri,” ujarnya menambahkan. Bahkan, ada usulan dibentuk lembaga penyadapan bagi seluruh penegak hukum, bukan

hanya untuk KPK. Tetapi belum ada kesepakatan bentuk lembaga tersebut.

Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia Akhlar Salmi mengusulkan agar penyadapan yang dilakukan KPK untuk kepentingan penyelidikan dugaan kasus korupsi, tidak perlu meminta izin kepada Pengadilan Negeri.

“Penyadapan yang dilakukan KPK bisa saja sangat mendadak serta bisa dilakukan pada hari libur atau tengah malam,” katanya.

Dijelaskannya jika KPK harus meminta izin lebih dahulu kepada Pengadilan negeri waktunya akan menjadi lama, apalagi Pengadilan Negeri hanya buka pada jam kerja, sedangkan penyadapan bisa dilakukan diluar jam kerja.

Kalaupun harus meminta izin lebih dahulu kepada Pengadilan Negeri, kata dia, proses meminta izinnya seperti apa ?

“Apakah disampaikan secara tertulis melalui surat atau disampaikan langsung secara lisan ? izin itu siapa yang menerima?” katanya.

Menurutnya jika permintaan izin dilakukan secara tertulis melalui surat, dalam birokrasi surat itu dicatat dulu sebagai surat masuk dan kemudian disampaikan kepada pimpinan Pengadilan Negeri. Dalam hal ini, kata dia, proses pencatatan dan penyampaian surat itu akan memakan waktu cukup lama serta berpotensi bocor.

“Karena tercatat dalam buku surat masuk, bisa saja rencana penyadapan itu bocor kepada orang yang akan disadap,” katanya. Karena itu Akhlar mengusulkan agar penyadapan yang dilakukan oleh KPK untuk kepentingan penyelidikan dugaan kasus korupsi tidak perlu meminta izin kepada Pengadilan Negeri.

Namun disisi lain, kata Akhlar, harus juga diatur rambu-rambunya, bahwa penyadapan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan dugaan korupsi, tidak bisa dilakukan untuk kepentingan pribadi. (as)foto:od/parle.



Ketua DPR RI Marzuki Alie didampingi Wakil Ketua Priyo Budi Santoso dan Sohibul Iman, serta Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika menerima Ketua Komisi Yudisial RI Suparman Marzuki di Ruang Rapat Pimpinan, Gedung Nusantara III DPR RI, Selasa (30/7). Foto: wahyu



Tim Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR dipimpin Ketua Komisi VII DPR Sutan Bathoegana meninjau Kantor Wilayah Kemenkumham di LP Tanjung Gusta, Medan, Kamis (25/7). Foto: suci



Tim Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR dipimpin Ketua Komisi VII DPR Sutan Bathoegana ke Kantor PLN Pusat, Jakarta, Rabu (31/7). Foto: Iwan Armanias